

## Siaran Pers

# SETAHUN DILUNCURKAN, MINAT INVESTOR BERINVESTASI MELALUI SKEMA PINA BERGERAK POSITIF

Jakarta, 24 Januari 2018 – Upaya Kementerian PPN/Bappenas yang diberi mandat oleh Presiden Joko Widodo untuk mencari alternatif pembiayaan proyek-proyek infrastruktur strategis nasional melalui skema **Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA)** yang dimulai sejak tahun lalu terus bergerak positif. Menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro per Desember 2017 jumlah proyek dalam *pipeline* PINA mencapai 34 proyek infrastruktur yang terdiversifikasi dalam empat sektor, antara lain: jalan tol, penerbangan, pembangkit dan transmisi listrik, dan pariwisata, dengan total nilai proyek sebesar Rp 348,2 triliun atau USD 25,79 miliar.

Menurut Menteri Bambang pencapaian skema pembiayaan PINA dalam *pipeline* proyek infrastruktur tersebut tersebar di seluruh Indonesia yang meliputi: (1) Waskita Toll Road-Jalan tol Trans Jawa dan Non-Trans Jawa, 18 proyek dengan total nilai proyek Rp 135 triliun/USD 10.000 juta; (2) PT PJB-Pembangkit Listrik, 2 proyek dengan total nilai proyek Rp 14,5 triliun/USD 1.071 juta; (3) PT Indonesia Power-Pembangkit Listrik, 6 proyek dengan total nilai proyek Rp 78,3 triliun/USD 5.798 juta; (4) PT PLN-Transmisi Listrik, total nilai proyek Rp 27,5 triliun/USD 2.040 juta; (5) BIJB Pengembangan Fase 2 dan Aerocity, 2 proyek dengan total nilai proyek Rp 30 triliun/USD 2.237 juta; (6) Bandara Kulon Progo DIY-PT Angkasa Pura 1 dan PT PP, total nilai proyek Rp 6,7 triliun/USD 495 juta; (7) Pesawat R-80-PT RAI, Rp 21,6 triliun/USD 1.600 juta; dan (8) Pengembangan Area Terintegrasi Pulau Flores-Flores Prosperindo Ltd, total nilai proyek Rp 13,5 triliun/USD 1.000.

Beliau menambahkan, Kementerian PPN/Bappenas juga telah melakukan beberapa hal strategis untuk mendorong iklim investasi melalui skema PINA menjadi lebih baik. Untuk aspek regulasi misalnya, Kementerian PPN/Bappenas terus berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan relaksasi dan harmonisasi regulasi mengenai isu-isu terhadap instrument investasi baru. Koordinasi dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) juga dilakukan untuk membahas mengenai aturan pencatatan keuangan yang asimetris. Untuk aspek tata memperkuat tata kelola dan regulasi, beberapa hal yang dilakukan seperti mengembangkan rencana strategis dan pedoman tata kelola yang baik untuk PINA serta melakukan riset dan studi mengenai hal-hal yang berkaitan untuk memperkuat fungsi dan peran PINA dalam skema pembiayaan investasi. “Kita juga terus melakukan forum sosialisasi PINA dengan berbagai pemangku kepentingan dan berkoordinasi dengan berbagai asosiasi untuk menggali potensi *investee* dan investor,” ujar Menteri Bambang.

Menteri Bambang menjelaskan skema pembiayaan PINA didesain untuk mengisi kekurangan pendanaan proyek-proyek infrastruktur prioritas yang membutuhkan modal besar, namun tetap dinilai baik secara komersial. Untuk dapat menjalankan proyek-proyek ini, BUMN dan swasta pengembang infrastruktur harus memiliki kecukupan modal minimum. Selama ini, permodalan BUMN ditopang dan sangat tergantung kepada anggaran pemerintah melalui Penanaman Modal Negara (PMN). Saat ini, kata Bambang, ruang fiskal APBN semakin terbatas sehingga dibutuhkan sumber-sumber non-anggaran pemerintah dengan memanfaatkan dana kelolaan jangka panjang yang setengah menganggur seperti pada dana-dana pensiun dan asuransi baik dari dalam maupun luar negeri. “Bambang menjelaskan pembiayaan infrastruktur dengan skema PINA sangat urgen dalam rangka mengoptimalkan peran BUMN dan swasta dalam pembiayaan pembangunan. Menurut Bambang, BUMN dan swasta dapat berperan dalam pemenuhan 58,7 persen atau sebesar Rp 2.817 triliun pada RPJMN 2015-2019,” tutur Bambang saat ditemui wartawan, Selasa kemarin.

Jakarta, 24 Januari 2018

Thohir Afandi  
Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan  
Kementerian PPN/Bappenas

Untuk informasi lebih lanjut:  
Kementerian PPN/Bappenas

Jalan Taman Suropati No. 2, Jakarta 10310  
Telepon: (021) 31936207, 3905650  
Faksimile: (021) 31901154  
e-mail: [humas@bappenas.go.id](mailto:humas@bappenas.go.id)